

SKRIPSI

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA
PEKANBARU**

*Disusun dan Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



**Oleh:
TRI PUTRI INDIRAYANA
155310577**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kota Pekanbaru

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru, dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwapernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Yang memberikan pernyataan,



Tri Putri Indirayana

NPM : 155310577

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada OPD Kota Pekanbaru.

Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah kasubag bagian keuangan, bendahara dan staff bagian keuangan yang berada di 44 OPD Kota Pekanbaru dengan jumlah responden berjumlah 176 orang. Metode yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan tipe *survey research*. Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas. Model analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah Uji parsial (Uji-t), uji simultan (Uji-f) dan koefisien determinasi (R^2).

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial dan simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Kata kunci : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of the quality of human resources, the use of information technology, and the internal control system on the value of financial reporting information at OPD Pekanbaru City.

Determination of the sample using purposive sampling technique. The sample in this study is the head of the financial division, treasurer and financial staff who are in 44 OPD Pekanbaru City with a total of 176 respondents. The method used is a quantitative method with the type of survey research. Testing the quality of the data used is the validity test. The classic assumption test used is the normality test. The data analysis model used is multiple linear regression. Hypothesis testing used is the partial test (t-test), simultaneous test (F-test) and the coefficient of determination (R²).

Based on the results of research partially and simultaneously the results of this study indicate that the quality of human resources, the use of information technology and internal control systems have a significant effect on the financial reporting information value of the Pekanbaru City Regional Apparatus Organization.

Keywords: Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology, and Internal Control Systems and the Value of Local Government Financial Reporting Information

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Kasih dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madya Pekanbaru”**. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman yang sifatnya membangun.

Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi, dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
6. Kepala Dinas di seluruh OPD Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Indra Usman dan Ibunda Ellyana Djuana yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan semangat, motivasi yang selalu diberikan hingga saat ini. *No words can describe how much I love you.* Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan kebaikan dunia dan akhirat.
8. Tak lupa juga kepada kakak-kakaku tercinta Usmalya Juana Rifsha S.Ikom, Tutria Indriyani Amd.Keb, adik-adikku tersayang Miftahul Jannah, dan Fathimah Az-Zahra terimakasih untuk segala dukungan dan doa dari awal pembuatan skripsi hingga sekarang dan kakak-kakak iparku Harry Pratama S.STP dan Donny Andrianto yang tanpanya penulis mungkin tidak akan mendapat akses mudah ke OPD Kota Madya Pekanbaru.
9. Diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai dititik ini. Kamu hebat.

10. Kepada teman-temanku Rosi Rosdiana, Annisa Fauzana, Ambar ArdiahN, Ola Novinka, Rani Mulyani, Randy Liano S.T, Dani Pratama, Wan M. Johan, Maulana Ramadhani, dan M. Bustanul Arifin yang siap sedia mendengarkan keluh kesah penulis tanpa lelah 24 jam nonstop.
11. Kepada Ronaldho Trianbudi, penulis ucapkan beribu terimakasih karena telah setia membantu dan mendampingi penulis saat senang maupun duka, saat sehat ataupun tidak, *Thank you and absolutely I love you.*
12. Untuk seluruh pihak yang begitu baik yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga bantuan dan kebaikannya dapat bernilai pahala disisi Allah Subhanahu Wata'ala dan semoga Allah berikan balasan, berkah dan rahmatnya. Aamiin ya robbal'alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAM JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN	
PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBNG SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TELAHAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	14
2.1 Telaah Pustaka	14
2.1.1 Pemerintah Daerah	14
2.1.2 Pelaporan Keuangan	14

2.1.3	Karakteristik-Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	16
2.1.4	Nilai Informasi	19
2.1.5	Indikator Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	20
2.1.6	Kualitas Sumber Daya Manusia	21
2.1.7	Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia	23
2.1.8	Pemanfaatan Teknologi Informasi	25
2.1.9	Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi	27
2.1.10	Pengendalian Intern	28
2.1.11	Indikator Sistem Pengendalian Intern	30
2.1.12	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	32
2.1.13	Penelitian Terdahulu	37
2.1.14	Model Penelitian	39
2.2	Hipotesis	40
BAB III	METODE PENELITIAN	41
3.1	Desain Penelitian	41
3.2	Objek Penelitian.....	41
3.3	Definisi Variabel Penelitian.....	41
3.3.1	Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	42
3.3.2	Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	45
3.4	Populasi dan Sampel.....	47
3.4.1	Populasi	47
3.4.2	Sampel	47
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	49

3.6	Teknik Pengumpulan Data	50
3.6.1	Uji Kualitas Data	50
a.	Uji Validitas	50
b.	Uji Reliabilitas.....	51
c.	Uji Asumsi Klasik	51
3.7	Teknik Analisis Data	52
3.8	Pengujian Hipotesis	53
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
4.1.1	Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	54
4.1.2	Visi dan Misi Kota Pekanbaru	55
4.1.3	Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru	56
4.2	Hasil Pengumpulan Data	67
4.2.1	Statistik Deskriptif	71
4.2.2	Uji Kualitas Data	72
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	73
4.2.4	Analisis Data	75
4.2.5	Koefisien Determinasi R^2	77
4.2.6	Pengujian Hipotesis	78
4.3	Pembahasan Penelitian	80
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	85
5.1	Simpulan	85
5.2	Saran	86
	DAFTAR PUSTAKA	88
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1	Nama OPD Kota Pekanbaru	48
Tabel 4.1	Distirbusi Kursioner	68
Tabel 4.2	Karateristik Responden Pada OPD Kota Pekanbaru	69
Tabel 4.3	<i>Descriptive Statistics</i>	71
Tabel 4.4	Kesimpulan Hasil Uji Kualitas Data	72
Tabel 4.5	Hasil Uji Realibilitas	73
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Normalitas	73
Tabel 4.7	Hasil Uji Multikolineritas	74
Tabel 4.8	Regresi Linear	76
Tabel 4.9	<i>Model Summary</i>	77
Tabel 4.10	Uji t	78
Tabel 4.11	Uji F	79

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	33
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administratif Kota Pekanbaru	54
Gambar 4.2 <i>Dependent Variable</i>	75



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Pengisian Kuesioner
- Lampiran 2 Karakteristik Responden
- Lampiran 3 Tabulasi Data Variabel Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia (X1)
- Lampiran 4 Tabulasi Data Variabel Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)
- Lampiran 5 Tabulasi Data Variabel Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X3)
- Lampiran 6 Tabulasi Data Variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y1)
- Lampiran 7 Hasil Uji Validitas Kuesioner Kualitas Sumberdaya Manusia
- Lampiran 8 Hasil Uji Validitas Kuesioner Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Lampiran 9 Hasil Uji Validitas Kuesioner Sistem Pengendalian Intern
- Lampiran 10 Hasil Uji Validasi Kuesioner Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
- Lampiran 11 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner
- Lampiran 12 Hasil Perhitungan Statistik Dengan Menggunakan Aplikasi SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peristiwa yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia kini adalah menguatnya tuntutan *transparency* (keterbukaan informasi) atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja kepada masyarakat. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut Nanda (2016) Standar akuntansi pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah sebelumnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah memakai sistem akuntansi *double entry* dengan menggunakan basis akrual (*accrual basis*). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan

menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh pegawai yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi.

Nilai informasi merupakan sebuah data atau informasi yang memiliki arti penting dan manfaat yang berguna dalam membuat keputusan dalam melakukan tindakan selanjutnya, nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern akuntansi (Fadila, 2013). Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung dengan teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dapat diandalkan, dan tepat waktu. Akan tetapi, selain sumber daya manusia dan teknologi informasi ada hal penting lainnya yang harus diperhatikan yaitu pengendalian intern yang berfungsi untuk mengatur teknik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan pengendalian intern, laporan serta pengawasan. Fungsi pengendalian tersebut dapat membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan- batasan dan hak-hak dalam bekerja serta teknologi informasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah, sebagai implementasi kebijakan publik pada praktik, memerlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai (Istyadi, 2010). Sumber daya manusia yang tidak memiliki kualitas, maka akan menimbulkan hambatan dalam melaksanakan fungsi akuntansi, dan pada akhirnya informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang baik atau tidak memiliki nilai (Dita, 2011). Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya bekal pendidikan pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Afrianti, 2011). Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, sumber daya manusia mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas agar menghasilkan sebuah laporan keuangan yang bernilai.

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan, Sutabri (2014:3). Teknologi sistem informasi diperlukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mengurangi tingkat kesalahan, mengolah data dengan tepat, akurat, hemat waktu, dan membantu penyediaan informasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan *manager* dalam

pengambilan keputusan. Oleh karena itu sistem informasi manajemen dan teknologi sistem informasi mempunyai hubungan yang sangat erat untuk saling berinteraksi dan mempengaruhi suatu organisasi. Agar tujuan dari organisasi dapat direalisasikan dengan mudah dan informasi yang dihasilkan dapat dapat digunakan untuk mengambil keputusan, maka harus memiliki sistem informasi manajemen yang baik dan dilengkapi dengan teknologi sistem informasi yang memadai. Teknologi sistem organisasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja individual dalam organisasi, yang secara otomatis diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan pada suatu organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif (Jogiyanto, 2011). Pemerintah Pusat maupun Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola Keuangan Daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara tepat dan luas, maka dapat membuka peluang dari berbagai pihak mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara tepat, cepat, dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pengendalian intern akuntansi berfungsi untuk mengatur teknik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi, prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan. Pengendalian intern tersebut juga dapat membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan-batasan atau hak-hak dalam bekerja serta berperan penting untuk mencegah terjadinya kecurangan yang ada pada suatu organisasi pemerintah daerah (Fadila, 2013).

Sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern. PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal yang optimal mampu meyakinkan stakeholder maupun publik tentang keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah.

Bukan hanya itu, pengendalian internal juga diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta memberikan perlindungan terhadap data organisasi dari berbagai ancaman, salah satunya adalah penyelewengan atau sabotase sistem (Roshanti et al, 2014). Pengendalian internal akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal.

Penelitian tentang nilai informasi pelaporan keuangan pada OPD sudah diteliti terlebih dahulu dengan hasil yang tidak konsisten diantaranya, Fadhillah (2013) dengan judul pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat) penelitian ini menggunakan metode total sampling karena jumlah responden tidak lebih dari 100 dan hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Lailatul (2014) dengan judul yang sama namun ditempat yang berbeda dengan metode *purposive sampling* yang mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Jember. Ini menandakan jika pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya rendah serta terdapat hambatan di dalam pengolahan data seperti tidak dimanfaatkannya perkembangan teknologi informasi yang ada dan terdapat penyimpangan di dalam laporan keuangan maka dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang diisyaratkan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) pada 42 SKPD Kabupaten Solok, sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 126 responden dengan judul pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pmda (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Solok) dan menggunakan metode *total sampling*, menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian Fadila dan Lailatul yaitu secara parsial kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, sedangkan hanya sistem pengendalian internlah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Artinya secara parsial, pendidikan dan pengetahuan para ASN dan pemanfaatan akan informasi teknologi di Kabupaten Solok tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan yang mereka publikasikan kepada masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi,dkk (2015) berjudul Pengaruh pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tabanan) dengan responden berjumlah 90 orang dan menggunakan metode *purposive sampling* menyatakan, bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Disini bisa dilihat bahwasanya semakin berkualitasnya sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, dan sistem pengendalian

intern yang baik maka semakin berkualitas pula nilai informasi yang dihasilkan oleh setiap instansi pemerintah.

Akan tetapi Kartika dan Dewi (2018) justru memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi,dkk (2015). Penelitian yang berjudul pengaruh pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Magelang) menyimpulkan bahwa hanya kapasitas sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah..

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Havivah (2014) dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada SKPD Kabupaten Jember). Perbedaan penelitian ini dengan Lailatul Havivah terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu mengambil pada SKPD Kabupaten Jember sedangkan penelitian ini dilakukan pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Pekanbaru.

Alasan memilih objek penelitian pada OPD Kota Pekanbaru dikarenakan Pekanbaru dalam 4 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2016 hingga 2019 selalu mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan

Riau, namun pada tahun 2016 BPK menemukan sejumlah temuan. Terdapat 10 temuan pada hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal. Diantaranya pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas tidak tertib. Penatausahaan piutang bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi bangunan (PBB) P2 Pemko Pekanbaru belum memadai, dan beberapa temuan lainnya.

Sedangkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat 13 temuan. Di antaranya, pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran tidak tertib. Kemudian, pemanfaatan aset tetap hak pengelolaan lahan (HLP) tidak tertib. Juga, Pemko Pekanbaru belum menghitung dan mengkompensasi kelebihan penyeteroran pajak penghasilan Pasal 21 Tahun 2016.

Temuan lainnya yaitu di tahun 2017 di mana penatausahaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dinilai tidak tertib. Kemudian, BLUD Puskemas belum menyusun laporan keuangan secara memadai. Penatausahaan plat uji kir di UPTD Pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan juga tidak tertib. Selain itu BPK juga menemukan adanya nilai aset tetap Pemko Pekanbaru pada neraca per 31 desember 2017 belum disajikan secara lengkap dan akurat. Kemudian belanja listrik di Dinas Perhubungan sebagianya belum dikenakan denda keterlambatan. BPK juga menemukan adanya belanja jasa konsultansi pada dinas perhubungan yang mana tidak sesuai ketentuan. Tidak hanya itu, BPK juga menemukan realisasi belanja bahan bakar minyak dan belanja penggantian suku cadang dan belanja jasa

service pada dinas sosial yang tidak didukung dengan bukti yang sebenarnya. Terakhir, BPK menemukan adanya kekurangan volume atas belanja modal pada dua OPD.

Pada tahun 2018 BPK mendapati adanya kekurangan volume campuran mutu K-225 pada 17 paket perjalanan semenisasi jalan lingkungan. Sehingga menyebabkan kelebihan bayar yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PERKIM) kepada pihak rekanan atau konraktor dalam proyek sebesar 194 juta rupiah.

Selanjutnya pada tahun 2019 Kota Pekanbaru memiliki nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang masih rendah, di mana nilai tersebut ialah 58 atau dengan predikat CC dari nilai maksimal AA, walaupun nilai ini sudah naik 4 point dari tahun sebelumnya tetapi Kota Pekanbaru merupakan salah satu dari dua daerah yang nilai SAKIP nya masih dibawah B untuk wilayah Provinsi Riau.

Berdasarkan data tersebut maka saya tertarik ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dengan mengajukan judul penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada OPD Kota Madya Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.
3. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.
4. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada OPD Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui pengaruh dari pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada OPD Kota Pekanbaru

3. Untuk mengetahui pengaruh dari pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada OPD Kota Pekanbaru.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian, diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat banyak pihak antara lain:

1. Bagi penulis

Untuk mengaplikasikan teori-teori dari mata kuliah dengan kenyataan serta menambah pengetahuan dan informasi tentang pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dalam mengukur kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

3. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk judul yang sama yaitu pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap OPD Kota Pekanbaru.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan dibagi dibagi menjadi VI bab, yang masing-masing bab membahas masalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini merupakan telaah pustaka dan hipotesis yang membahas tentang pengertian kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengertian informasi, hubungan antar variabel dalam model penelitian, hasil penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang objek penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil pengolahan data dan analisis hasil pengujian hipotesis.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan dari penelitian dan saran dari penulisan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa :

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah memiliki program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder sebagai implikasi atas pelaksanaan otonomi daerah.”

2.1.2 Pelaporan Keuangan

a. Pengertian Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses meliputi segala aspek yang berkaitan dengan bagaimana penyediaan, pelaporan dan penyampaian informasi keuangan suatu pemerintahan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan yang akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial (Suwardjono, 2012:110). Aspek-aspek tersebut antara lain

lembaga yang terlibat, peraturan yang berlaku termasuk prinsip akuntansi berterima umum (PABU), dan mekanisme penyampaian informasi.

Menurut Tanjung (2014:12) Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

b. Tujuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuan pelaporan keuangan adalah :

“Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Sedangkan secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah :

Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendana aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.3 Karakteristik-Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan menyajikan informasi yang penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pelaporan keuangan karena laporan keuangan yang baik akan mempengaruhi pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu, mereka menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Pengertian karakteristik kualitatif laporan keuangan pada standar akuntansi keuangan (SAK) berbeda dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Pada standar akuntansi keuangan SAK dinyatakan: “Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai (KDP-LK, paragraf 24).” Sementara pada kerangka konseptual akuntansi

pemerintah (KKAP): karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (KKAP, paragraf 32). Kembali, komite standar akuntansi pemerintah (KSAP) menterjemahkan sebuah poin penting dengan kalimat himbauan atau adaptasi. Dalam standar akuntansi keuangan (SAK), karakteristik kualitatif didefinisikan secara tegas sebagai “ciri khas”. Sementara dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) dinyatakan sebagai “ukuran yang perlu diwujudkan”.

Laporan keuangan harus memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik untuk berbagai kepentingan pengguna salah satunya penggunaan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) harus memiliki karakteristik dasar sebagai berikut :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat dipahami

Menurut *international financial reporting standards (IFRS Framework)* didalam buku Harison Jr. dkk (2011) Karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) untuk menggambarkan atribut yang membuat informasi yang tersedia dalam laporan keuangan yang bermanfaat bagi pemakai terbagi menjadi empat yaitu:

1. Dapat dipahami

Dapat dipahami berarti bahwa informasi akuntansi harus cukup transparan sehingga masuk akal bagi pemakai pengetahuan yang memadai mengenai bisnis, aktivitas ekonomi dan akuntansi, serta bersedia mempelajari informasi dengan tekun.

2. Relevansi

Agar menjadi relevan, informasi harus mampu menyajikan perbedaan bagi pembuat keputusan, yang memiliki nilai prediktif atau umpan balik. Jadi, cara dimana informasi mengenai transaksi dan peristiwa masa lalu akan disajikan dapat mempengaruhi secara langsung nilai prediktif dan umpan balik informasi.

3. Realibilitas

Realibilitas adalah informasi yang disajikan dan dapat diandalkan. Secara umum, informasi dapat diandalkan jika lengkap, bebas dari kesalahan atau bias material, terpercaya, dan dapat diharapkan untuk mempresentasikan secara wajar substansi ekonomi dari peristiwa atau transaksi yang mendasar (tanpa memandang bentuk hukum peristiwa atau transaksi tersebut).

4. Komparabilitas

Komparabilitas adalah informasi keuangan yang dapat dibandingkan. Komparabilitas bukan berarti keseragaman, atau terus menggunakan prinsip dan kebijakan akuntansi yang sama apabila tersedia alternatif yang lebih relevan serta dapat diandalkan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam sebuah laporan keuangan yang baik dan dapat dikatakan bermanfaat bagi penggunanya jika laporan keuangan yang disajikan tersebut mudah dipahami dan relevan atau bermanfaat bagi penggunanya. Selain itu, laporan keuangan tidak hanya berguna bagi satu pihak saja tetapi berguna bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam menggunakan laporan keuangan tersebut, serta laporan keuangan antar periode bisa dibandingkan sehingga laporan antar periode bisa dinilai dan bisa diidentifikasi bagaimana kinerja keuangan perusahaan.

2.1.4 Nilai Informasi

Suatu informasi memiliki nilai karena informasi tersebut dapat dijadikan keputusan yang baik serta menguntungkan bagi pemakai informasi tersebut. Besarnya nilai informasi yang tepat dapat didapatkan dari perbedaan hasil yang didapat dari keputusan yang baru dengan hasil keputusan yang lama dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Menurut Davis dalam buku Hartono (2013) dengan judul Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer, nilai informasi dikatakan sempurna jika terdapat perbedaan antara kebijakan optimal, tanpa informasi yang sempurna dan kebijakan optimal maka informasi tersebut tidak dapat dinyatakan dengan jelas.

Nilai suatu informasi menurut Jogiyanto (2011) dibagi berdasarkan 10 jenis yaitu sebagai berikut :

1. Kemudahan dalam memperoleh, Diperoleh secara mudah berbeda jika Informasi yang penting dan dibutuhkan menjadi tidak bernilai jika sulit diperoleh.
2. Sifat luas dan kelengkapannya, Mempunyai lingkup atau cakupan yang luas dan lengkap. Informasi yang tidak lengkap menjadi tidak bernilai, karena tidak dapat digunakan.

3. Ketelitian (*accuracy*), Mempunyai ketelitian yang tinggi atau akurat, informasi menjadi tidak bernilai jika tidak akurat, karena akan mengakibatkan kesalahan dalam mengambil keputusan.
4. Kecocokan dengan pengguna (*relevance*), Sesuai dengan kebutuhan penggunanya, jika Informasi tidak sesuai dengan kebutuhan penggunanya, maka tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi.
5. Ketepatan waktu, Diterima oleh pengguna pada saat yang tepat. Jika terlambat diterima atau using, maka tidak dapat dimanfaatkan pada saat pengambilan keputusan.
6. Kejelasan (*clarity*), Informasi yang jelas akan meningkatkan kesempurnaan nilai informasi.
7. Fleksibilitas, Memiliki fleksibilitas tinggi, fleksibilitas informasi diperlukan oleh para manajer atau pimpinan atau selain pejabat pada saat pengambilan keputusan.
8. Dapat dibuktikan, Dapat dibuktikan kebenarannya, kebenaran informasi bergantung pada validitas data sumber yang diolah.
9. Tidak ada prasangka, Apabila informasi tersebut tidak menimbulkan prasangka dan keraguan adanya kesalahan informasi.
10. Dapat diukur, Informasi untuk pengambilan keputusan seharusnya dapat diukur agar dapat mencapai nilai yang sempurna.

2.1.5 Indikator Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Keempat indikator berikut ini menurut Erlina (2015:30), dan Siregar (2015:77) adalah :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan antar unit pemerintahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan oleh laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.6 Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hullah dkk, 2011:11). Sumber daya manusia memerankan peran penting dalam skala kecil maupun besar. Pada setiap organisasi, besar maupun kecil, kunci keberhasilan utama bagi organisasi tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang mengendalikan dan menjalankannya. Pegawai yang tidak mempunyai

pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Hal yang sama dikemukakan oleh Anggraeni (2013,1000) dimana sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam organisasi hal ini karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi, di mana sumber daya manusia tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya bekal pendidikan pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001) dalam Afrianti, (2011). Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kemudian dipaparkan oleh Rahardjo (2010:18) menjelaskan pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu kualitas sumber daya manusia itu hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya. Pengertian yang dikemukakan oleh Sumarjan (2009:43) yang dikutip oleh Danim (2012) bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kita inginkan dibedah atas dasar

kualitas fisik (kesehatan, kekuatan jasmani, keterampilan dan ketahanan) dan kualitas non fisik (kemandirian, ketekunan, kejujuran dan akhlak).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi dengan aspek keterampilan yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, kejujuran dan pengalaman.

2.1.7 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Setelah mengemukakan beberapa pengertian-pengertian kualitas sumber daya manusia menurut para ahli diatas. Peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai ukuran-ukuran untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang diadaptasi dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan dari Sedarmayanti (2011:53) adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan fisik (kesehatan)
2. Kemampuan non fisik, yang meliputi
3. Kemampuan Intelektual (kecerdasan)
4. Kemampuan Psikologis (mental)

Adapun penilaian dalam mengukur kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mencakup sumber daya manusia yang memenuhi berbagai kriteria dalam ukuran-ukuran di atas yaitu meliputi :

1. Kemampuan Fisik (Kesehatan)

Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Penelitian terhadap berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam ratusan pekerjaan telah

mengidentifikasi sembilan kemampuan dasar yang tercakup dalam kinerja dari tugas-tugas fisik. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan fisik (kesehatan) ini meliputi :

- a. Memiliki kesehatan yang baik serta kesegaran jasmani
- b. Memiliki tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi

2. Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan, dan untuk alasan yang tepat, pada nilai yang tinggi. Individu yang cerdas juga lebih mungkin menjadi pemimpin dalam suatu kelompok. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan intelektual (kecerdasan) ini meliputi :

- a. Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
- b. Memiliki tingkatan ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja, baik yang tersedia di tingkat local, nasional maupun internasional.
- c. Memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa ibu (daerah) dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.
- d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi.

3. Kemampuan Psikologis (mental)

Kemampuan psikologis (mental) adalah kemampuan yang berkaitan dengan etika, perilaku, sikap, serta fungsi mental manusia secara ilmiah yang

biasanya dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk memberi penilaian baik-buruk suatu keadaan/kondisi didalam melaksanakan pekerjaan. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan intelektual (kecerdasan) ini meliputi :

- a. Taat menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama.
- b. Memiliki semangat yang tinggi dan kejuangan yang tangguh, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.
- c. Jujur yang dilandasi kesamaan antara pikiran, perkataan dan perbuatan serta tanggung jawab yang dipikulnya.
- d. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan atas dasar kesamaan lebih mendahulukan kewajiban daripada hak sebagai Warga Negara.
- e. Memiliki sikap adaptif dan kritis terhadap pengaruh negative nilai-nilai budaya asing.
- f. Memiliki kesadaran disiplin nasional sebagai suatu budaya bangsa yang senantiasa ingin maju.
- g. Memiliki semangat kompetisi yang tinggi dengan meningkatkan motivasi, etos kerja dan produktivitas demi pembangunan bangsa dan Negara.
- h. Berjiwa besar dan berpikiran positif dalam setiap menghadapi permasalahan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi keutuhan dan kemajuan.
- i. Memiliki sifat keterbukaan yang dilandasi rasa tanggung jawab bagi kepentingan bangsa.
- j. Memiliki kesadaran hokum yang tinggi serta menyadari hak dan kewajiban asasinya dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945.

2.1.8 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya istilah teknologi informasi dikenal dengan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik atau EDP (Electronic Data Processing). Sutabri (2014:3) menyatakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan

informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Menurut Widjayanto (2001:89) dalam Sembiring (2013) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah. Menyangkut pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, hal ini didasarkan kepada semakin meningkatnya total volume APBN/D dari tahun ketahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin kompleks dan rumit.

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan pelaporan yang baik pula. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, karena pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data.

Contoh pemanfaatan teknologi di kalangan pemerintah adalah *E government* (e-gov). E-gov merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Melalui e-governance ini

pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat, berkomunikasi langsung dengan masyarakat, serta mempublikasikan berbagai informasi termasuk informasi keuangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan serangkaian proses pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk dapat mengakses informasi yang tersebut.

2.1.9 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Santiadji Mustafa (2010) pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integritas informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Konstruksi pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator:

1. Perangkat, merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan.
2. Pengelolaan Data Keuangan, merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh.
3. Perawatan, merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan.

2.1.10 Pengendalian Intern

a. Definisi Pengendalian Intern

Kumaat (2011:15) memaparkan pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Selain itu pendapat lain diungkapkan oleh Hall (2011:180) pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal adalah kewajiban pihak manajemen yang penting. Aspek mendasar dari tanggung jawab penyediaan informasi pihak manajemen adalah untuk memberikan jaminan yang wajar bagi pemegang saham bahwa perusahaan dikendalikan dengan baik. Selain itu pihak manajemen bertanggung jawab untuk melengkapi pemegang saham serta investor dengan informasi keuangan yang andal dan tepat waktu.

Pengertian pengendalian intern menurut Hery (2013:159) adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Mulyadi (2016:129) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi perusahaan, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset

perusahaan, mengecek keandalan data akuntansi, mendukung efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan definisi diatas maka pengendalian intern merupakan segala kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga aset yang dimilikinya guna menghondari penggelapan (fraud).

b. Tujuan Pengendalian Intern

Berikut ini merupakan tujuan pengendalian intern menurut *committee of sponsoring organizations of the tread way commission (COSO) framework* (2011):

1. Tujuan Operasi

Tujuan operasi berkaitan dengan pencapaian misi dasar entitas, tujuan ini bervariasi tergantung oleh pilihan manajemen yang berkaitan dengan struktur, pertimbangan industri, dan kinerja entitas, terkait untuk proses operasi dalam divisi, anak perusahaan, unit produksi dan fungsi yang diarkan untuk entitas tujuan utamanya.

2. Tujuan Pelaporan

Tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan maupun non keuangan dan pelaporan internal atau eksternal. Tujuan internal didorong oleh kebutuhan intern dalam menanggapi kebutuhan potensial. Sementara eksternal didorong oleh peraturan atau standar yang diterapkan.

3. Tujuan Kepatuhan

Kegiatan operasional sebuah perusahaan sering mengambil tindakan tertentu berdasarkan situasi, hal ini harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.11 Indikator Sistem Pengendalian Intern

Menurut Azhar Susanto (2013: 96) sistem pengendalian intern terbagi atas 5 bagian sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Pembentukan suasana organisasi serta memberikan kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi, yang merupakan dasar bagi semua komponen pengendalian internal lain yang melahirkan hierarki dalam membentuk struktur organisasi. Lingkungan pengendalian memiliki tujuh komponen, antara lain:

- a. Integritas dan nilai-nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
- d. Partisipasi dewan direksi dan tim auditor.
- e. Struktur organisasi.
- f. Pemberian wewenang dan tanggungjawab.
- g. Kebijakan mengenai sumber daya manusia dan penerapannya.

2. Penilaian resiko.

Penilaian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berikut ini adalah lima hal kenapa penilaian resiko sangat penting adalah:

- a. Bidang baru bisnis yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah diterapkan sebelumnya.
 - b. Perubahan standar akuntansi.
 - c. Hukum dan peraturan baru.
 - d. Perubahan yang terkait revisi sistem dan teknologi baru
3. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi tugas Pengendalian Aktivitas

Kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah melakukan sebagai mana seharusnya. Seorang akuntan mengenali berbagai jenis pengendalian aktivitas diantaranya yaitu:

- a. Prosedur Otorisasi.
 - b. Mengamankan aset dan catatannya.
 - c. Mengamankan aset dan catatannya
 - d. Pemisahan Tugas
 - e. Catatan dan dokumentasi yang memadai.
4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Secara tradisional seorang akuntan mengenal sistem akuntansi sebagai sarana komunikasi intern perusahaan. Sistem akuntansi dengan komponen yang dimilikinya memiliki prosedur dan fakta yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi akuntansi,

menyusunnya, menganalisis, mengklasifikasikan dan melaporkannya. Sistem akuntansi juga menjaga *asset* dan kewajiban organisasi.

5. Monitoring

Monitoring merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja dari pengendalian intern.

2.1.12 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2009) dalam Wansyah et.al.,(2012). Kapasitas sumberdaya manusia yang memadai dari segi kualitas dan kuantitatif akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Ariesta (2013) menyatakan apabila sumber daya manusia pelaku sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan maka kualitas informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi akan memiliki

kualitas yang rendah. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan.

Mengacu pada penelitian sebelumnya, Sonia (2016) dengan judul skripsi pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai pelaporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Kampar menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Hasil penelitian diatas dapat dijelaskan apabila semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan semakin baik pelaporan yang disajikannya, hal ini disebabkan oleh pendidikan, pelatihan serta pengetahuan yang didapat cukup untuk menyajikan pelaporan keuangan.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mana merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Susanto (2013:12) memaparkan pengertian teknologi informasi adalah “Suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer”. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi difungsikan agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009) dalam Wansyah et.al., (2012).

Pramudiarta (2015) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Desember (2016) dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Palelawan) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa semakin baiknya kemampuan dalam menguasai teknologi maka semakin baik pula pelaporan keuangan yang disajikan. Hal ini dapat dijelaskan oleh pemanfaatan teknologi yang membantu dalam meminimalkan kesalahan yang bersifat *human error* dan mengurangi penyimpangan-penyimpangan.

c. **Sistem Pengendalian Intern**

Pengertian pengendalian intern menurut *COSO (Committee of Sponsoring Organizations)* dari *Treadway Commission* dalam Azhar Susanto (2013:95) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut penelitian Sukaesih (2017) dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman) menyatakan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Semakin baik pengendalian internnya maka semakin baik pula pelaporan keuangan yang disajikan, karna untuk mencapai informasi yang akurat diperlukan komponen pengendalian atau kontrol. Komponen pengendalian atau kontrol dapat menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan adanya komponen pengendalian tersebut maka dapat menghasilkan informasi yang andal. Keterandalan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari aspek atau lingkungan.

2.1.13 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Fadila Ariesta (2013)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat)	Fadila Ariesta menyimpulkan bahwa pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2	Lailatul Havivah (2014)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada SKPD di Kabupaten Jember)	Hasil penelitian dari Lailatul Havivah ialah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Jember
3	Arina Roshanti, Edy Sujana, Kadek Sinarwati (2014)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem Pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan Keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng	Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Buleleng
4	Putu Ratih Pratiwi, I Made Pradana Adiputra, Ananta	Pengaruh pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern	Hasilnya menunjukkan bahwa keuangan daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian

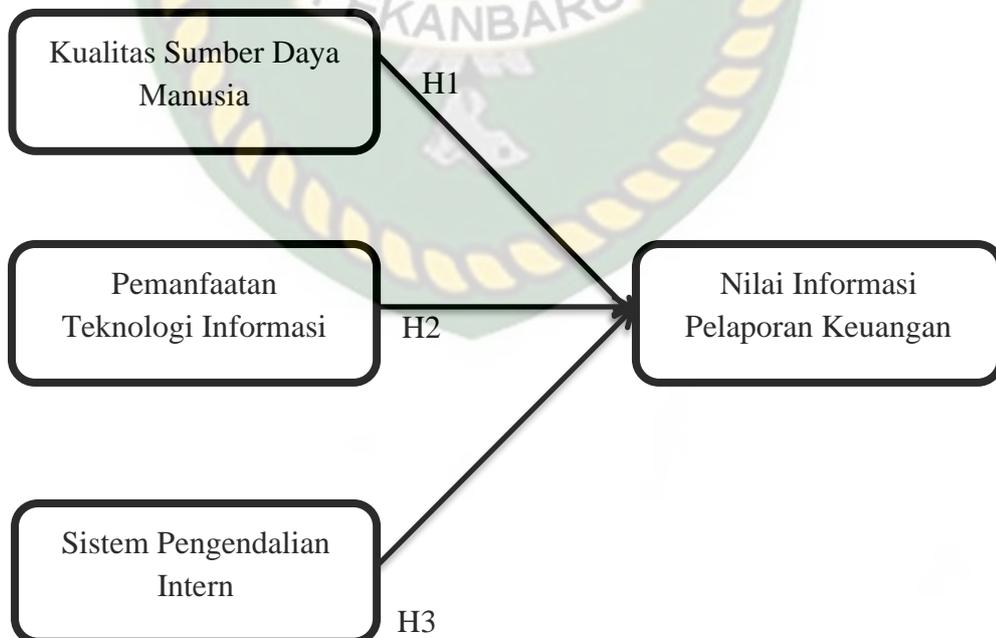
	Wikrama T. Atmaja (2015)	akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tabanan)	intern akuntansi terbukti berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
5	Dewi Puspita Sonia, Vince Ratnawati, Yuneita Anisma (2016)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan perangkat kerja daerah kabupaten Kampar)	Menyimpulkan bahwa Kapasits Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
6	Noni Putri Mulia (2017)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan bagi Bank Umum di Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.	Hasil penelitian dari Noni Putri Mulia menyatakan secara simultan semua variabel independen berpengaruh secara signifikan pada variabel dependen tapi secara parsial hanya kualitas SDM, dan sistem pengendalian internlah yang berpengaruh secara signifikan.
7	Rita Dwi Putri (2017)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemda (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Solok)	Rita Dwi Putri mengemukakan bahwa hanya kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah

			daerah Kabupaten Solok.
8	Hendira Rita Kartika dan Dewi Amalia (2018)	Pengaruh pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Magelang)	Hanya kapasitas sumber daya manusialah yang berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, pada Pemerintah Kota Magelang.

2.1.14 Model Penelitian

Model Penelitian yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Kualitas SDM berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
- H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
- H3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
- H4 : Kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
- H4 : Kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe *survey research* yaitu dengan menggunakan metode pengukuran statistik yang hasilnya diperoleh dari jawaban yang di berikan kepada responden melalui kuisisioner. Selanjutnya data diolah menggunakan SPSS 22.0 untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Variabel independen penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern, sedangkan variabel dependennya adalah nilai informasi pelaporan keuangan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madya Pekanbaru. Masalah yang diteliti adalah “Pengaruh Kualitas Sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan”.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Variabel merujuk pada karakteristik dan atribut seorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau di observasi (Creswell, 2010:76). Pada penelitian ini ada dua jenis variabel yang digunakan yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan tujuan agar hipotesis yang diajukan dapat diuji dan pertanyaan penelitian dapat dijawab.

Instrument adalah alat untuk menghimpun data. Dalam penelitian ini, agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda maka secara operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2018:39) variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen), yang disimbolkan dengan simbol (X). Bahwa variabel bebas adalah variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain dan menjadi faktor penyebab dalam mempengaruhi variabel yang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) dan Sistem Pengendalian Intern (X_3) akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan, baik secara individu ataupun kelompok. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang berasal manusia. Daya yang bersumber dari manusia dapat juga disebut sebagai energi atau kekuatan, yang mana sumber ini harus utuh dan berkualitas agar dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh, pemahaman tentang tugasnya, kesiapan dalam melaksanakan perubahan dalam cara kerja dan penguasaan teknologi dan kesehatan yang prima.

Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kerjanya, seseorang akan lebih mudah memahami dan melaksanakan tugasnya. Ditambah dengan pelatihan yang diberikan dari instansi, maka membuat seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa dan yang sudah baik menjadi lebih baik.

Kuisisioner dalam penelitian ini merupakan kuisisioner yang dikembangkan dari penelitian Enjelina (2013). Sub Indikator pada kuisisioner kualitas sumberdaya manusia ialah sebagai berikut:

1. Kualitas para pegawai
2. Pengetahuan kerja
3. Keahlian kerja
4. Bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil
5. Mempunyai keterampilan yang baik.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Pada beberapa pertanyaan kuisisioner terdapat beberapa alternatif jawaban yang tersedia dengan skala likert. Pengukuran variabel ini menggunakan 7 item pertanyaan. Dengan skala likert 5 poin. Skor terendah 1 intensitasnya “sangat tidak setuju”. Kemudian skor tertinggi 5 intensitasnya “sangat setuju”. Responden di minta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan variabel kualitas sumberdaya manusia (X_1) yang di ajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses, menyusun, menyimpan, mengubah data

dengan segala macam cara unuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga yang berkualitas. Kuisisioner dalam penelitian ini merupakan kuisisioner yang dikembangkan dari penelitian Enjelina (2013). Sub Indikator pada kuesioner pemanfaatan teknologi informasi ialah sebagai berikut:

1. Fasilitas kerja yang memadai
2. Memanfaatkan teknologi informasi
3. Menaati peraturan perundang-undangan
4. Penjadwalan pemeliharaan peralatan yang teratur.

Pengukuran variabel ini menggunakan 7 item pertanyaan. Dengan skala likert 5 poin. Skor terendah 1 intensitasnya “sangat tidak setuju”. Kemudian skor tertinggi 5 intensitasnya “sangat setuju”. Responden di minta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) yang di ajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

c. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian interen adalah bagian akuntansi dari pengendalian interen yang meliputi rencana organisasi, prosedur dan pencatatan yang di rancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi. Kuisisioner dalam penelitian ini merupakan kuisisioner yang dikembangkan dari penelitian Zuliarti (2012). Responden di minta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan variabel pengendalian interen (X3) yang di ajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Sub Indikator pada kuesioner Sistem Pengendalian Intern ialah sebagai berikut:

1. Mengikuti ketentuan akuntansi
2. Otoritas dalam mengakses data
3. Dilengkapi bukti yang valid dan sah
4. *Balance*
5. Dijaga kebaruannya, pemantauan pengendalian, pembagian kerja

Pengukuran variabel ini menggunakan 9 item pertanyaan. Dengan skala likert 5 poin. Skor terendah 1 intensitasnya “sangat tidak setuju”. Kemudian skor tertinggi 5 intensitasnya “sangat setuju”. Responden di minta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) yang di ajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.3.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel terikat ini merupakan *outcome* atau hasil dari pengaruh variabel bebas (Creswell, 2010:77). Kemudian variabel terikat (dependen) menurut Sugiyono (2018:39) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, yang disimbolkan dengan simbol (Y). Untuk kuesioner nilai informasi pelaporan keuangan terdapat 9 item Berdasarkan uraian tersebut, variabel terikat yang digunakan adalah :

Informasi Pelaporan Keuangan

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah nilai informasi pelaporan keuangan. Nilai informasi laporan keuangan adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan materian serta dapat di andalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat di bandingkan dengan periode-periode sebelumnya *SFAC (Statement of financial Accounting Concepts)*. Kuisisioner dalam penelitian ini merupakan kuisisioner yang dikembangkan dari penelitian Enjelina (2013) dengan sub indikatornya sebagai berikut:

1. Relevan (*Relevance*)
2. Dapat diandalkan (*Reliability*)
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat di pahami

Pengukuran variabel ini menggunakan 9 item pertanyaan. Dengan skala likert 5 poin. Skor terendah 1 intensitasnya “sangat tidak setuju”. Kemudian skor tertinggi 5 intensitasnya “sangat setuju”. Responden di minta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan variabel Nilai informasi (Y) yang di ajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Sugiyono (2018:130) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ASN OPD Kota Madya Pekanbaru yang berjumlah 7.649 orang (Data Sektoral Kota Pekanbaru 2020).

3.4.2 Sampel

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah suatu metode pemilihan sampel dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dijadikan sampel penelitian. Kriteria responden dalam penelitian ini ialah:

1. Kepala sub bagian keuangan.
2. Bendahara.
3. Staf OPD dengan masa kerja minimal satu tahun di bidang keuangan yang berjumlah dua orang.

Sehingga keseluruhan responden yang diambil adalah 176 orang. Penentuan kriteria sampel didasarkan bahwa pimpinan/ kepala OPD bagian keuangan adalah pihak selaku pengguna/*user* yang berperan penting dalam mengambil keputusan dalam lingkup intern OPD selain itu dalam melaksanakan proses anggaran kasubag bagian keuangan bertanggung bjawab mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinya. Sedangkan bagian keuangan adalah pihak yang terlibat dalam proses

pembuatan laporan keuangan, kepala sub bagian keuangan OPD (organisasi perangkat daerah) merupakan pihak yang mempunyai wewenang dalam penyusunan anggaran belanja daerah dan perubahannya, perhitungan anggaran, serta membina mengawasi, mengendalikan dan mengelola keuangan pemerintah daerah (PP No 58 Tahun 2005). Penentuan kriteria responden yang masa kerjanya minimal 1 tahun dikarenakan pegawai yang masa kerjanya sudah 1 tahun dianggap sudah memiliki pengalaman yang cukup memadai di bidang pembukuan dan mengerti tentang keuangan (Anita 2012).

Tabel 3.1
Nama OPD Kota Pekanbaru

No	Nama SKPD
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Badan Penelitian dan Pengembangan
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9	Badan Pendapatan Daerah
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Dinas Pendidikan
12	Dinas Kesehatan
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
15	Satuan Polisi Pamong Praja
16	Dinas Sosial
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru
18	Dinas Tenaga Kerja
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20	Dinas Ketahanan Pangan
21	Dinas Pertanahan
22	Dinas Lingkungan Hidup
23	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

25	Dinas Perhubungan
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Stasistika dan Persandian
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
28	Dinas Pemuda dan Olahraga
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31	Dinas Pertanian dan Perikanan
32	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
33	Kecamatan Bukit Raya
34	Kecamatan Marpoyan Damai
35	Kecamatan Payung Sekaki
36	Kecamatan Rumbai
37	Kecamatan Rumbai Pesisir
38	Kecamatan Tampan
39	Kecamatan Tenanyan Raya
40	Kecamatan Limapuluh
41	Kecamatan Pekanbaru Kota
42	Kecamatan Senapelan
43	Kecamatan Sukajadi
44	Kecamatan Sail

(Sumber :Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Pekanbaru).

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data primer menurut Arikunto (2013:172) adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Untuk kasus ini data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner yang disebarakan langsung, yang secara khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Sumber data dapat berupa objek (orang) secara individual diperoleh dari setiap responden, sedangkan data sekunder menurut Arikunto (2013:22) adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain) yang kemudian dapat digunakan untuk memperkaya data primer.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan penulis dalam usaha pengumpulan data adalah dengan angket. Menurut Sukmadinata (2011) “angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden” (p.219).

Tujuannya adalah memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak, (Machmud, 2016:64).

3.6.1 Uji Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh. Pengujian kualitas data dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas seluruh item pertanyaan yang akan digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian.

a. Uji Validitas

Uji Validitas yaitu uji yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur itu mampu mengukur apa yang ingin diukur (Azwar, 199; dalam Wibowo, 2012:35). Uji ini dapat diketahui apakah item-item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dapat digunakan untuk mengukur keadaan responden yang sebenarnya dan menyempurnakan kuesioner tersebut. Uji validitas ini menggunakan metode *Pearson Product Moment* yaitu dalam menentukan

kelayakan atau tidaknya suatu item yang akan digunakan dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien korelasi hitung terhadap nilai r Tabel (Wibowo, 2012:37).

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukur diulangi dua kali atau lebih (Azwar, 1999; dalam Wibowo, 2012:52). Uji Reliabilitas ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha* yaitu kriteria diterima atau tidaknya suatu data reliable atau tidak jika nilai alpha lebih besar daripada nilai kritis produk moment, atau nilai r Tabel (Wibowo, 2012:53).

c. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak. Pengujian menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dimana jika signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, dan jika signifikan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal (Priyatno, 2013:58).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10,00 (Priyatno, 2013:59).

3. Uji Heteroskedastisita

Heteroskedastisita adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model heteroskedastisita. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisita dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisita (Priyatno, 2013:13).

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam proses pengujian data yang hasilnya dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang siap diolah akan dianalisis dengan beberapa alat uji statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0. Analisis data penelitian menggunakan metode statistik regresi berganda. Metode ini adalah alat analisis statistik untuk menguji pengaruh antara satu variabel independen dan variabel dependen. Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun bentuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Nilai Informasi Pelaporan Laporan Keuangan

b_0 : Konstanta

b_1, b_2, b_3 : Koefisien Regresi

- X_1 : Kualitas Sumber Daya Manusia
 X_2 : Pemanfaatan teknologi Informasi
 X_3 : Sistem Pengendalian Intern
e : Error

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen (Priyatno, 2013:50).

3.8.2 Uji Simultan F (Uji F)

Uji Simultan atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak atau tidak. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independent secara serentak terhadap variabel dependen (Priyatno, 2013:48).

3.8.3 Koefisien Determinasi

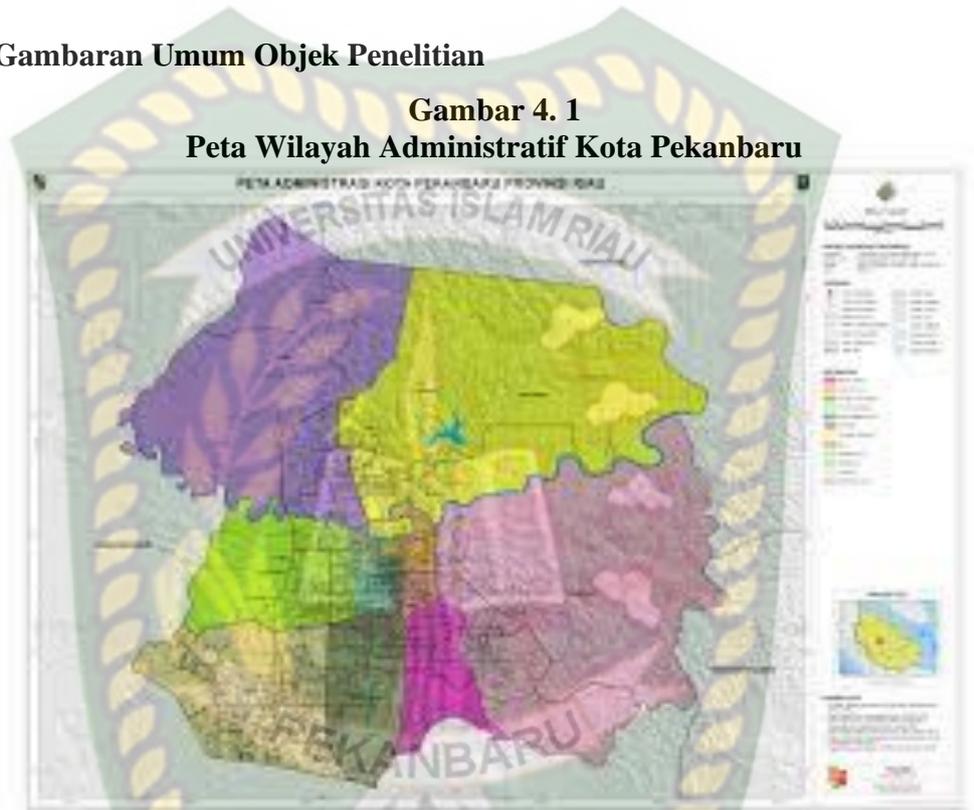
Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika Koefisien Determinasi (R^2) semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y dimana $0 < R < 1$. Sebaliknya, jika Koefisien Determinasi (R^2) semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa berpengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambar 4. 1
Peta Wilayah Administratif Kota Pekanbaru



Sumber : petamatikaindo.wordpress.com

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat

sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

a. Visi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu **“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”**.

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”**.

b. Misi Kota Pekanbaru

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa
2. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu
5. Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
6. Mewujudkan Pekanbaru yang asri dan lestari
7. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa

4.1.3 Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru bahwa dalam menjalankan tupoksinya, pemerintah kota Pekanbaru dibantu oleh 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Pekanbaru yang terdiri dari 2 sekretariat (Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dan Sekretariat DPRD), 1 pengawas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pekanbaru (Inspektorat), 6 Badan Daerah kota Pekanbaru, 23 dinas daerah kota Pekanbaru dan 12 kecamatan daerah kota Pekanbaru. Untuk penjelasan mengenai masing-masing SKPD tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Dinas Kesehatan

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Tugas pokok dinas kesehatan kota pekanbaru adalah merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dibidang kesehatan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Sedangkan adapun fungsi dari dinas kesehatan Kota Pekanbaru sendiri ialah :

1. Perencanaan program-program kesehatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
2. Pembinaan manajemen kesehatan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan kesehatan;
3. Pembinaan, pengawasan operasional dan pengendalian atas pengelolaan pelayanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta serta fasilitas non kesehatan yang mempunyai pengaruh kepada kesehatan masyarakat.
4. Pengupayaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
5. Perencanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan Medis KB dan Gizi Masyarakat;
6. Perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit dan penanganan kejadian luar biasa bidang kesehatan;

7. Perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap Kesehatan Lingkungan;
8. Perencanaan dan pengadaan obat untuk puskesmas dan jaringannya serta pengawasan sarana dan kesediaan farmasi di sarana pelayanan swasta;
9. Pengawasan makanan dan minuman yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat dari proses produksi sampai dengan peredarannya;
10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik pemerintah maupun swasta;
11. Penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah;
12. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan atau sistem lain;
13. Pembinaan dan pengawasan mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
14. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
15. Penanggulangan masalah darurat dan berencana.
16. Perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
17. Perencanaan, pengembangan, dan pendayagunaan sumber daya kesehatan.
18. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan Promosi Kesehatan.

b. Dinas Sosial

Merujuk pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Adapun susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Jaminan Sosial
 - a. Seksi perlindungan korban bencana
 - b. Seksi pengawasan dan pengendalian sumber dana bantuan sosial
 - c. Seksi perlindungan dan penyantunan lanjut usia terlantar
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Eks Korban Napza dan Hukuman
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang
5. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi pemberdayaan sosial keluarga miskin
 - b. Seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat
 - c. Seksi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
6. Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Sekda atau sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tugas pembantu lainnya.

e. Kecamatan Tipe A

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru menjabarkan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi :
 - a. Sub bagian umum
 - b. Sub bagian keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
5. Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaa Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Terpadu

8. Kelompok Jabatan Fungsional

f. Kecamatan Tipe B

Menilik pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka susunan organisasi kecamatan tipe B Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi :
 - a. Sub bagian umum
 - b. Sub bagian keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaa Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pelayanan Terpadu
7. Kelompok Jabatan Fungsional

g. Bappeda

Susunan organisasi Bappeda menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Darah
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pengembangan Pemukiman Dan Prasarana Wilayah,

a. Sub Bidang Prasarana Wilayah

b. Sub Bidang Pemukiman Dan Penataan Wilayah

c. Sub Bidang Lingkungan Hidup

4. Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Sumber Daya

a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

b. Sub Bidang Kebudayaan Dan Sumber Daya

c. Sub Bidang Kependudukan Dan Tenaga Kerja

5. Bidang Perekonomian Dan Pemerintahan

a. Sub Bidang Perekonomian Dan Investasi

b. Sub Bidang Perdagangan Dan Jasa

c. Sub Bidang Pemerintahan

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

7. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru mempunyai fungsi dan tugas pokok sesuai Dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Fungsi disuducapil ialah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi
4. Pembinaan dan pelaporan
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kota Pekanbaru di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan rincian tugas antara lain:

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan informasi administrasi kependudukan.
3. Membina dan melaksanakan tugas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan dalam arti merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, perizinan, retribusi, standarisasi pelayanan, pengelolaan data dan informasi, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program keselamatan bidang perhubungan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengaturan dan pengendalian lalu lintas, patroli dan pengawalan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana perhubungan, pembinaan disiplin, serta pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan;
2. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang perhubungan;
3. Perencanaan program/kegiatan di bidang perhubungan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengaturan dan pengendalian lalu lintas, serta patroli dan pengawalan lalu lintas dan angkutan jalan;
6. Pembinaan dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana perhubungan;
7. Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan;
8. Pembinaan dan pemberian perizinan di bidang perhubungan;
9. Pembinaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang perhubungan;

10. Pembinaan dan penetapan standarisasi pelayanan di bidang perhubungan;
11. Pembinaan dan pengelolaan data dan informasi di bidang perhubungan;
12. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di bidang perhubungan;
13. Pembinaan dan penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta program keselamatan di bidang perhubungan;
14. Pembinaan disiplin serta pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum di bidang perhubungan

j. Dinas Ketahanan Pangan

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki Tugas Pokok **“Membantu Walikota Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan”**.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Pekanbaru, maka susunan organisasi dinas koprasi, usaha kecil, dan menengah ialah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Kepegawaian, UMKM dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Koperasi
 - a. Seksi Bina Lembaga Koperasi
 - b. Seksi Promosi Koperasi
 - c. Seksi Bina Usaha Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM
 - b. Seksi promosi dan Investasi UMKM
 - c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM
5. Bidang Fasilitas Pembiayaan Dan Jasa Keuangan
- a. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan
 - b. Seksi Pengawasan Permodalan dan Investasi UMKM
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi
6. Bidang Pelatihan Dan Penyuluhan
- a. Seksi Pelatihan
 - b. Seksi Penyuluhan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Bidang Pelatihan Teknis Dinas (UPTD)

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini didapatkan dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi sampel yaitu seluruh pegawai. Total kuisisioner yang dibagikan adalah 176 kuisisioner. Total kuisisioner yang kembali adalah 159. Dengan penjelasan pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuisisioner yang disebar	176	100%
Total kuisisioner yang dikembalikan	159	90.34%
Total kuisisioner yang tidak kembali	17	9.65%
Kuisisioner yang tidak dapat dianalisis	0	0 %
Total kuisisioner	159	90.34%

Sumber: Data primer 2020

Berdasarkan tabel diatas, kuisisioner yang dikembalikan dan dapat dianalisis adalah sebanyak 159 kuisisioner. Sedangkan kuisisioner sisanya tidak dikembalikan tidak dapat dijadikan sebagai sampel.

Sebelum membahas tentang tanggapan responden tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berikut diuraikan tentang karakteristik responden yang terdiri dari umur, jenis kelamin, jabatan responden, tingkat pendidikan, bidang keahlian dan lama bekerja. Berikut ini dapat dilihat karakteristik responden dalam penelitian ini :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Pada OPD Kota Pekanbaru

NO.	Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
1.	Usia		
	1. 20-30 tahun	44	27.67%
	2. 31-40 tahun	75	47.16%
	3. 41-50 tahun	34	21.38%
	4. 50 keatas	5	3.77%
	Total	159	100%
2.	Jenis Kelamin		
	1. Pria	73	45.91%
	2. Wanita	86	54.08%
	Total	159	100%
3.	Jabatan		
	1. Kasubag keuangan	39	24.52%
	2. Bendahara	40	25.15%
	3. Staff keuangan	80	50.31%
	Total	159	100%
4.	Pendidikan Terakhir		
	1. SMA	34	21.38%
	2. D1	2	1.25%
	3. D3	15	9.43%
	4. S1	96	60.37%
	5. S2	12	7.54%
	Total	159	100%
5.	Bidang Keahlian		
	1. Akuntansi	45	28.30%
	2. Manajemen	20	12.57%
	3. Teknik	7	1.25%
	4. Hukum	2	4.40%
	5. Ilmu lainnya	85	53.45%
	Total	159	100%
6.	Lama Bekerja		
	1. 1 tahun	3	1.88%
	2. 2 tahun	8	5.03%
	3. 3 tahun	9	5.66%
	4. 4 tahun	18	11.32%
	5. >5 tahun	121	76.10%
	Total	159	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa dari 159 responden, responden yang berumur 20-30 tahun berjumlah 44 atau sekitar 27,67% Responden yang berumur 31-40 berjumlah 75 atau sekitar 47,16%. Berumur 41-50 berjumlah 34 atau sekitar 21,38% dan yang berumur >50 tahun berjumlah 6 atau sekitar 3,77%.

Untuk jenis kelamin jumlah responden pria sebanyak 73 orang atau sekitar 45,91% dan jumlah responden wanita sebanyak 86 orang atau sekitar 54,08%.

Responden yang menjabat sebagai kasubag berjumlah 39 atau sekitar 24,52%. Bendahara berjumlah 40 atau sekitar 25,15%, dan responden yang menjabat sebagai staff keuangan berjumlah 80 atau sekitar 50,31%.

Responden dengan pendidikan terakhir SMA 31 berjumlah atau sekitar 19,49%. D1 berjumlah 2 atau 1,25%, D3 berjumlah 16 atau 10,06%. Sedangkan untuk berlatar pendidikan S1 berjumlah 98 atau 61,63%, dan S2 berjumlah 12 atau 7,54%.

Bidang keahlian responden untuk akuntansi berjumlah 45 atau sekitar 28,30%, untuk manajemen berjumlah 20 atau sekitar 12,57%. Teknik berjumlah 2 atau 1,25% dan hukum berjumlah 7 atau 4,40% untuk ilmu bidang lainnya berjumlah 85 atau 53,45%.

Dari tabel diatas dapat dilihat responden yang lama bekerjanya 1 tahun berjumlah 3 atau 1,88%. 2 tahun berjumlah 8 atau 5,03%, 3 tahun berjumlah 9 atau 5,66%. Kemudian 4 tahun berjumlah 18 atau 11,32% dan >5 tahun berjumlah 121 atau 76,10%.

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, variabel variabel tersebut adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Adapun statistik deskriptif berdasarkan hasil kuisioner sebagai berikut :

Tabel 4.3
Descriptive Statistics

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Kualitas sdm	159	22	35	30.75	0.131	1.653
Pemanfaatan TI	159	25	35	30.97	0.127	1.601
SPI	159	34	44	39.88	0.143	1.798
Nilai informasi	159	30	45	39.64	0.177	2.229
Valid N (listwise)	159					

Sumber : Data Olahan 2020

Pada tabel 4.3 *descriptive statistic* diatas, dijelaskan bahwa nilai jawaban responden yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan sebagai berikut: untuk variabel (X_1) nilai rata-rata yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan (Y) dari 159 responden adalah sebesar 30.75 dengan standar deviasinya 1.653. Selanjutnya variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) nilai rata rata mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan dari 159 responden

adalah sebesar 30.97 dengan standar deviasinya 1.601. Selanjutnya untuk variabel pengendalian intern nilai rata rata mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan dari 159 responden adalah sebesar 39.88 dengan standar deviasi 1.798. Dan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata jawaban responden yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan adalah 39.64 dengan standar deviasi 2.229.

4.2.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrument dalam pengukuran apa yang diukur. Uji validitas ini menggunakan metode *person correlation* dengan menghitung korelasi masing-masing nilai item dengan nilai total. Nilai tital item adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Berikut adalah tabel hasil uji kualitas data :

Tabel 4.4
Kesimpulan Hasil Uji Kualitas Data

Variabel	<i>Person correlation</i>	Kesimpulan
X1	0,239**-0,578**	Valid
X2	0,343**-0,499**	Valid
X3	0,234**-0,479**	Valid
Y	0,381**-0,572**	Valid

Sumber: Data olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.4, hasil uji validitas untuk variabel pengetahuan akuntansi dan nilai informasi pelaporan keuangan dinyatakan valid, karena nilai r hitung $\geq r$ tabel (0,1557). Dengan demikian poin-poin pertanyaan dalam variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian

intern dan nilai informasi pelaporan keuangan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Hasil dari pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa tidak ada koefisien *croanbach Alpha* yang kurang dari 0,1557 sehingga instrument dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk mengolah data selanjutnya.

Tabel 4.5
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Croanbach Alpha</i>	Kesimpulan
X1	7	0.277	Reliabel
X2	7	0.244	Reliabel
X3	9	0.257	Reliabel
Y	9	0.521	Reliabel

Sumber : Data olahan, 2020

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4.6
Hail Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testz		
		Unstandardized Residual
N		159
	Mean	.0000000
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1.99066430
	Absolute	0.051
Most Extreme Differences	Positive	0.038
	Negative	-0.051
Test Statistic		0.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Output SPSS, 2020

Tabel 4.6 diatas adalah tabel yang menjelaskan apakah data yang terdistribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat dengan menggunakan uji non parametik satu sampel *kolmogrov-Smirnov Test*, dan *Normal Probability* plot. Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, *Asymp.sig* (2-tailed) sebesar 0.200 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinierialitas

Uji multikolinierialitas adalah pengujian yang dilakukan dengan melakukan pengujian asumsi regresi berganda. Asumsi multikolinierialitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala kolerasi antar variabel independen. Uji mulikolinierialitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS Versi 22.0 yang dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF). Hasil uji mulrikolinierialitas data ini pada persamaan regresi 1 dapat dilihat dari tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinierialitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	10.737	4.644		2.312	0.022			
Kualitas sdm	0.202	0.101	0.150	2.006	0.047	0.919	1.088	
Pemanfaatan TI	0.326	0.104	0.234	3.144	0.002	0.930	1.075	
SPI	0.316	0.096	0.255	3.300	0.001	0.864	1.157	

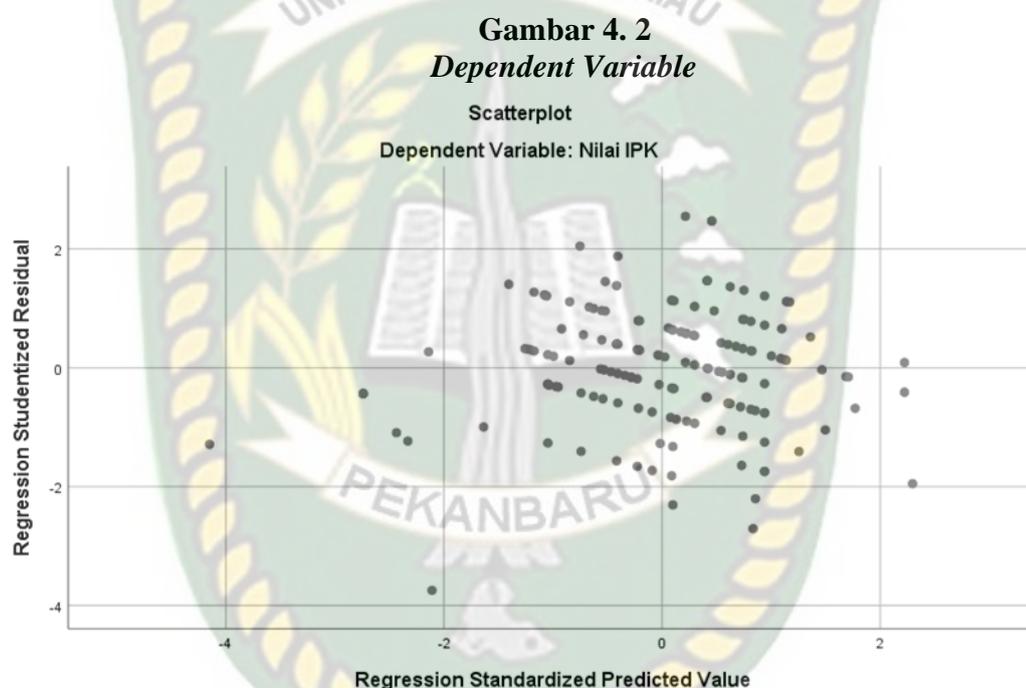
Sumber: Data Output SPSS, 2020

Berdasarkan hasil Uji multikolinierialitas diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada satupun variabel yang mempunyai nilai Tolerance >0.1 dan ketiga variabel

tersebut mempunyai nilai 0,919(X1), 0,930(X2) dan 0,864(X3) adapun nilai VIF <10 yaitu 1,088(X1), 1,075(X2) dan 1,157(X3) kedua variabel Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi variabel bebas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dari hasil *output software* SPSS versi. 22.0 pada gambar scatterplot sebagai berikut:



Sumber: Data Output SPSS,2020

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat dan simpulkan bahwa titik-titik pada gambar 4.2 tersebut menyebar dan tidak membentuk pola-pola pola tertentu. Diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tidak membentuk pola yang jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data yaitu teknik analisis regresi liner berganda. Sebab digunakannya teknik analisis regresi linear berganda ini

adalah karena adanya hubungan antara variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Hasil analisis regresi linear berganda ini menggunakan *software* SPSS 22, Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8
Regrasi Linear

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	10.737	4.644		2.312	0.022	
Kualitas sdm	0.202	0.101	0.150	2.006	0.047	
Pemanfaatan TI	0.326	0.104	0.234	3.144	0.002	
SPI	0.316	0.096	0.255	3.300	0.001	

a. *Dependent Variable: Nilai IPK*

Sumber : Data ouput SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$\text{Nilai IPK} = 10,737 + 0,202 X_1 + 0,326 X_2 + 0,316 X_3 + e$$

Penjelasan dari persamaan diatas adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) sebesar 10,737 artinya jika variabel independen yaitu nilai informasi pelaporan keuangan, dan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern bernilai 0 (nol) maka nilai informasi pelaporan keuangan bernilai 10,737
2. Nilai koefisien regresi variabel kualitas sumber daya manusia (X_1) memiliki nilai positif, yaitu 0,202. artinya, bahwa setiap peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 1 maka akan mengakibatkan peningkatan nilai

informasi pelaporan keuangan sebesar 0,202 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.

3. Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) bernilai positif, yaitu 0,326 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel skala usaha sebesar 1 maka akan mengakibatkan peningkatan penggunaan informasi sebesar 0,326 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel pengendalian intern (X_3) bernilai positif, yaitu 0,316 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel skala usaha sebesar 1 maka akan mengakibatkan peningkatan penggunaan informasi sebesar 0,316 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.

4.2.5 Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi dapat dilihat dari hasil output SPSS 22 pada tabel *model summary* yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 9
Model Summary

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.721 ^a	.520	.505	.923
a. Predictors: (Constant), SPI, Pemanfaatan TI, Kualitas SDM				
b. Dependent Variable: Nilai IPK				

Sumber : Data output SPSS, 2020

Koefisien determinasi atau R square disimbolkan dengan R^2 menunjukkan besarnya perubahan variasi pada variabel dependen karena berubahnya variasi pada variabel independen. Pada tabel diatas diketahui $R^2 = 0,520$ dengan *adjusted* $R^2 = 0,505$ menunjukkan pengaruh 50,5%. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern memiliki persentase sebesar

50,5% terhadap nilai informasi pelaporan keuangan sedangkan sisanya sebesar 49,5% dapat dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau persamaan regresi. *Standar error of the estimate* adalah ukuran kesalahan yang diperoleh sebesar 0,923 artinya kesalahan dalam memprediksi kinerja individual sebesar 0,923 dimana semakin kecil *Standar error of the estimate* (SEE) ini maka akan membuat model regresi ini semakin tepat dalam memprediksi variabel.

4.2.6 Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen, H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ dan H_0 ditolak jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau Apabila signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima dan apabila signifikansi $> 5\%$ maka hipotesis ditolak. Hasil pengujian Uji t dapat dilihat pada Tabel 4.10

Tabel 4. 10
Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.737	4.644		2.312	0.022
Kualitas sdm	0.202	0.101	0.150	2.006	0.047
Pemanfaatan TI	0.326	0.104	0.234	3.144	0.002
PI	0.316	0.096	0.255	3.300	0.001

a. Dependent Variable: Nilai IPK

Sumber : Data output SPSS 2020

Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari uji parsial (t) pada model regresi linear berganda diperoleh nilai t = 2,006 lebih besar dari t tabel 1,975 dengan tingkat signifikansinya 0,047 <

$\alpha=0,05$ maka H_0 1 ditolak dan H_a 1 diterima, artinya secara parsial variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan

2. Hasil dari uji parsial (t) pada model regresi linear berganda diperoleh nilai $t = 3,144$ lebih besar dari t tabel $1,975$ dengan tingkat signifikansinya $0,002 < \alpha=0,05$ maka H_0 2 ditolak dan H_a 2 diterima, artinya secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
3. Hasil dari uji parsial (t) pada model regresi linear berganda diperoleh nilai $t = 3,300$ lebih besar dari t tabel $1,975$ dengan tingkat signifikansinya $0,001 < \alpha=0,05$ maka H_0 3 ditolak dan H_a 3 diterima, artinya secara parsial variabel pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

b. Uji F

Hasil uji F terhadap variabel penelitian dengan menggunakan *software* SPSS 22 dapat dilihat dari tabel annova 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4. 11
Uji F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Regression	158.729	3	52.910	13.098	.000 ^b	
Residual	626.114	155	4.039			
Total	784.843	158				
a. <i>Dependent Variable: Nilai_informasi</i>						
b. <i>Predictors: (Constant), PI, Pemanfaatan_TI, kualitas_sdm</i>						

Sumber : Data ouput SPSS, 2020

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern secara bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu nilai informasi pelaporan keuangan. Hasil dari output SPSS dapat dilihat dari tabel annova diatas atau uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 13,098 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat probabilitas signifikan $0,000 < \alpha=0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan.

Dari hasil tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa hasil dari hipotesis pertama yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,047 yang artinya hasil dari hipotesis ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H_1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan. Dibuktikan jika suatu Instansi Pemerintah memiliki Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) yang kurang kompeten maka Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan rendah.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Dewi (2018) yang menyatakan bahwa variabel Kualitas sumber daya manusia berpengaruh kepada nilai informasi pelaporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan semakin tinggi pula nilai informasi pelaporan keuangan instansi terkait.

Sumberdaya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumberdaya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data akan berdampak pada penyajian laporan keuangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri (2017) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi

Pelaporan Keuangan

Hasil dari hipotesis variabel kedua, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Variabel Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lailatul (2014) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hal ini dapat dijelaskan dengan semakin baiknya pemanfaatan teknologi maka akan meningkatkan nilai pelaporan keuangan. Penggunaan teknologi informasi memiliki dampak yang sangat besar pada nilai informasi pelaporan keuangan. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat maka akan meminimalkan *human error* (kesalahan akibat kelalaian manusia). Memanfaatkan teknologi informasi pada pelaporan keuangan juga memberikan dampak yang efektif dan efisien, karena komponen teknologi sistem komputer mempercepat proses transmisi data yang mana akan mendukung penciptaan proses nilai informasi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri (2017) yang hasilnya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Hasil dari hipotesis variabel ketiga menunjukkan bahwa signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hasil ini membuktikan bahwa pengendalian intern yang baik akan meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan, hal ini berkaitan dengan pengawasan terhadap personal yang merasa selalu diawasi oleh sistem pengendalian intern dari

suatu instansi atau organisasi akan meningkatkan kesadaran agar memberikan kinerja yang terbaik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratih dkk (2015) yang menyatakan bahwa pengendalian intern yang baik akan mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan karena untuk mencapai informasi yang akurat diperlukan komponen pengendalian atau kontrol. Komponen pengendalian atau kontrol akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Dengan adanya komponen kontrol dapat menunjang informasi dan menghasilkan informasi yang bernilai.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Dewi yang hasilnya menyatakan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

4.3.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil dari tabel 4.9 di atas diketahui $R^2 = 0,520$ dengan *adjusted* $R^2 = 0,505$ menunjukkan persentase 50,5%. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern memiliki persentase sebesar 50,5% terhadap nilai informasi pelaporan keuangan sedangkan sisanya sebesar 49,5% dapat dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau persamaan regresi. Artinya kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Putri (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis data dari hipotesis pertama yaitu kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,047 yang lebih kecil dari 0,05 artinya **H₁ diterima**. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kartika dan Dewi (2018).
2. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan hal ini dibuktikan dengan tabel signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 artinya **H₂ diterima**. Hasil ini sejalan dengan penelitian Susilawati (2018).
3. Berdasarkan analisis data penelitian ini diketahui bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 artinya **H₃ diterima**. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ratih dkk (2015).
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) serta Sistem Pengendalian Intern (X3) mempunyai pengaruh sebesar 50,5% sedangkan sisanya 49,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam

penelitian ini yang berarti **H₄ diterima**. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih masih terdapat faktor individual lain sebesar 49,5% yang dapat menjelaskan Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hasil ini sejalan dengan penelitian Putri (2017).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak :

1. Dengan adanya pengaruh dari kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan diharapkan bagi Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja para pegawai dalam hal pengelolaan keuangan seperti memberikan pelatihan, melengkapi fasilitas pendukung dalam hal pemanfaatan teknologi informasi agar teknologi yang ada dapat di pergunakan semaksimal mungkin, dan sistem pengendalian interen lebih di tingkatkan lagi dalam bentuk pegawai yang lebih bermutu dalam melaksanakan tanggung jawab agar pekerjaan lebih efektif, efisien dan individu lebih professional terhadap pekerjaannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengubah atau menambahkan variabel dalam penelitian selanjutnya sebab masih terdapat kemungkinan variabel-variabel lain yang lebih signifikan pengaruhnya terhadap kinerja individual dan mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas.

3. Untuk meningkatkan hasil representasi responden, penelitian selanjutnya dapat menambah responden dari berbagai pihak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni. M. D., Saryono. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika
- Ariesta, Fadila. (2013). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat). Jurnal. Padang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Arfianti, Dita. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten batang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Arikunto, Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell, John. W., (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Duwi, Priyatno. (2013). Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate Dengan SPSS. Yogyakarta : Gava Media
- Denim, Sudarwan. (2012). Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta : Rineka Cipta
- Hanafi, Mahmud M. (2016). Manajemen Keuangan Edisi 2. Yogyakarta: BPFYogyakarta
- Hullah, R. Abdurrahman. dkk. (2012). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- Insani, Istyadi. (2010). Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Dan Kinerja Organisasi Pemerintah. Penyempurnaan Makalah pada Workshop Manajemen Perkantoran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bandung
- Jogiyanto, HM. (2011). Analisis Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktik Aplikasi Bisnis, Yogyakarta, Andi
- Kumaat V. G. (2011), Internal Audit. Jakarta: Penerbit Erlangga

- Rahardjo, M.Dawam. (2010). *Intelektual, Intelegasi, dan Perilaku Politik dan Bangsa*. Bandung: Mizan
- Mulia, Noni P. (2017). *Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan bagi Bank Umum di Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu*. Skripsi. Pekanbaru : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
- Pratiwi Putu Ratih, I Made Pradana Adiputra, Ananta Wikrama T. Atmaja.(2015). *Pengaruh pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tabanan)*. Jurnal. Bali : Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha
- Putri, Rita D. (2017). *Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemda (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Solok)* Jurnal. Solok : Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
- Rama, Riri. (2018). *WTP Masih Diwarnai Temuan*. <https://riaupos.jawapos.com> (diakses 9 Agustus 2020)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susanto, Azhar. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur-Pengendalian Resiko-Pengembangan, Edisi Perdana, Lingga Jaya, Bandung*
- Sonia, Dewi Puspita, Vince Ratnawati, Yuneita Anisma. (2016). *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan perangkat kerja daerah kabupaten Kampar)*. Jurnal. Pekanbaru : Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- Sukmadinata, Nana S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutabri, Tata. (2014). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Andi
- Wibowo. (2012). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zuliarti. (2012). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai*

Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study pada Pemerintah Kabupaten Kudus). Skripsi. Kudus : Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal

